

BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Awal mula penulis tertarik mengangkat judul Analisis Persepsi Masyarakat Tentang Kepemimpinan Politik Wanita di Daerah Tahun 2008 di Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunung kidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah karena ditempat tersebut salah satu dari calon eksekutifnya yang terpercaya adalah seorang wanita yaitu, wakil Bupati Kab. Gunung kidul. Dengan hal ini, kesemuanya tidak terlepas dari suksesnya pelaksanaan Pilkada 2005 dan proses implementasi otonomi daerah di Kab. Gunung kidul.

Dengan suksesnya Pilkada 2005 di Kab. Gunung kidul dengan mengusung kandidat wanita sebagai pasangan politik dan pasangan kerja menandakan bahwa eksistensi wanita sudah dapat dipertanggung jawabkan. Apalagi saat ini rasa percaya dan kritis yang masyarakat tuangkan dalam pemilihan langsung di Pilkada dengan memilih seorang wanita sebagai bagian dari unsur birokrasi didaerah, merupakan wujud kepedulian dan kepercayaan masyarakat terhadap peran wanita dikancah perpolitikan Indonesia.

Dengan alasan pemilihan judul ini penulis ingin menunjukkan suatu fakta masalah baru yang menyangkut persepsi masyarakat tentang Kepemimpinan Politik Wanita di Daerah. Maka dengan ini akan terlihat seberapa besar perbedaan penilaian,

B.Latar Belakang Masalah

Berdasarkan permasalahan dilapangan saat ini dapat kita lihat bahwa proses implementasi suatu kebijakan pemerintah dengan adanya otonomi daerah mulai berjalan semakin baik hal ini ditandai oleh beberapa kegiatan-kegiatan politik yang mengalami banyak kesuksesan seperti, terselenggaranya proses Pilkada didaerah. Di Kecamatan Wonosari Kab. Gunung kidul sendiri fenomena Pilkada 2005 sangat marak karena berhasil mengusung seorang wanita sebagai bagian dari politik.

Berdasarkan hal ini,kita dapat melihat bahwa peran serta masyarakat di kecamatan Wonosari dalam pilkada 2005 telah semakin kritis dan pandai dalam memilih calon-calon eksekutif, semua tidak terlepas dari perjuangan wanita seperti; R.A Kartini yang dari dulu sampai sekarang ingin di hargai dan dihormati.

Pada saat ini kita melihat dan merasakan bahwa wanita telah mampu mengerjakan dan melaksanakan tugas yang biasanya hanya pria yang mampu lakukan, hal ini telah mencerminkan bahwa wanita kuat yang tidak harus meninggalkan kodratnya sebagai wanita yang notabene tidak terlepas dari kegiatan didalam rumah.

Adapun penyebab ketimpangan gender dilingkungan masyarakat adalah salah satunya faktor kultural, yang lebih dekat dengan kuatnya ideologi patriarkhi. Secara harfiah patriarkhi artinya aturan-aturan dari ayah/pria, tetapi kini diartikan sebagai dominasi pria di bawah aturan ayah (*the rule of father*), ini termasuk aturan-aturan suami-suami, 'bos' atau aturan pria-pria. Hal ini sebenarnya tidak dapat dipungkiri

konsep gender dan pandangan masyarakat terhadap wanita tentu semua ini adalah suatu keberhasilan yang luar biasa.

Berdasarkan fakta yang ada pada pilkada Kab. Gunungkidul tahun 2005 dapat dijelaskan bahwa ternyata ada dua wanita yang mencalonkan diri menjadi wakil bupati pada periode 2005-2010 mendatang, hal ini mengisyaratkan bahwa peran wanita di dunia politik patut diacungi jempol karena dengan keberanian dan eksisitensi yang tinggi wanita mampu tampil di depan publik atau masyarakat dengan berdampingan langsung bersama kaum pria. Dengan adanya fakta di lapangan seperti ini maka hal ini secara tidak langsung akan mampu memutuskan mata rantai apa yang dinamakan istilah isu-isu ketimpangam gender yang dilakukan kaum pria dan pemerintah seolah-olah tidak turut berperan dalam mewujudkan kesetaraan gender di Indonesia yang menyudutkan peran wanita di kehidupan ini dalam arti yang sebenarnya. Kesuksesan dan kemandegan eksisitensi wanita dalam politik tidak terlepas dari campur tangan pemerintah dan masyarakat sebagai konyrol sosial dan juri yang paling dominan dalam menilai segala tindakan yang dilakukan orang-orang yang berkepentingan politik. Masyarakat merupakan hal yang paling sensitif menanggapi masalah sosial di lingkungan sekitar.

Berdasarkan tabel di bawah ini tentu telah memberikan suatu fakta bahwa peran wanita sekarang di dunia politik telah menuju pada perbaikan, dimana kesemuanya itu tidak lepas daripada dukungan masyarakat luas yang telah pintar dan kritis menilai dan

Tabel. 1.1

**Daftar peserta calon Bupati dan wakil Kab.Gunungkidul
Dan parpol pendukungnya.**

NO	Nama Peserta Calon	Partai Politik
1.	Suharto-Bandingah	PAN
2.	Sugito-Nuniek	GOLKAR
3.	Gandung-Untung Santoso	GOLKAR
4.	Yoetikno-Sukamto	PDI-P
5.	Siswanto-Nur Iman	PDI-P

Sumber: Kompas

Adapun yang menjadi catatan kemenangan Suharto-Bandingah adalah telah nampak pada awal perhitungan suara yang baru mencapai 1.520 TPS dari 2.095 TPS yang tersebar diseluruh Kab. Gunungkidul, sudah dapat diprediksi pasangan ini akan menang walaupun dengan selisih yang banyak dari pasangan lain. Dari 1.520 TPS pasangan Suharto-Bandingah telah mengantongi suara 81.133 suara dan sementara memimpin dari kelima pasangan yang lain. Setelah pasangan Suharto- Bandingah disusul oleh pasangan dari Sugito-Nuniek yang memperoleh 69.371 suara, selanjutnya disusul oleh pasangan Gandung-Untung Santoso yang memperoleh 57.105 suara, selanjutnya disusul oleh pasangan Yoetikno-Sukamto yang diusung PDI-P memperoleh

Walaupun hal ini dalam perhitungan suara belum mengarah ke final namun, sudah dapat diprediksi bahwa pasangan Suharto-Bandingah akan melaju terus meninggalkan peserta calon yang lain.

Ternyata dalam Pilkada ini ada hal yang menarik yakni, ada dua orang calon wakil Bupati yang wanita ini menandakan bahwa wanita zaman sekarang telah mulai eksis dan semua ini tidak terlepas dari peran partai politik yang mendukungnya. Serta yang tidak kalah berperan adalah masyarakat itu sendiri dimana, anggapan dan persepsi masyarakat tentang wanita dengan stigma-stigma domestik sudah mulai diabaikan dikarenakan reputasi wanita sekarang sudah sangat baik.

Hal ini diperkuat oleh hasil penelitian Litbang Republika tentang aspirasi wanita anggota parlemen pusat dari 5 DPRD (DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Sumatera Utara) terhadap pemberdayaan politik wanita. Hasilnya, mereka didorong akan kenyataan bahwa keterwakilan wanita dalam badan legislatif masih jauh dari memadai yakni tidak lebih dari 12% saja. Padahal, populasi wanitadi Indonesia berjumlah lebih dari 50% daripada pria dan kedudukan mereka dalam badan legislatif tersebut dianggap mempunyai akses politik terhadap pembuat kebijakan dan diharapkan pemberdayaan wanita Indonesia dapat dilakukan namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa anggota parlemen kurang bisa mengaktualisasikan diri sesuai dengan misi yang harus mereka emban, Bahkan 36,3% dari mereka tidak tahu Konvensi PBB tentang Wanita dan 41,3% tidak tahu bahwa pemerintah Republik Indonesia telah

dalam mewujudkan kesetaraan gender di Indonesia kita tetap harus berusaha dan berjuang demi kesejahteraan masyarakat.

Dengan banyaknya penduduk khususnya di Kecamatan Wonosari ini dapat diasumsikan bahwa pemilih yang kebanyakan adalah wanita tidak menutup kemungkinan di saat itu mayoritas penduduk memilih pasangan Bupati dan wakil cenderung ke pasangan yang ada wanitanya. Hal ini dapat diperkuat berdasarkan fakta bahwa pasangan calon bupati yang mengusung kandidat wanita mendapat suara terbanyak dari pada pasangan yang keduanya sama-sama pria. Saat ini dapat diketahui salah satu wakil bupati di Kab. Gunung Kidul adalah wanita yang notabene adalah pilihan masyarakat seluruhnya sehingga dalam efektifitas kepemimpinan seseorang juga sangat ditentukan oleh kemampuannya mengenali secara tepat sifat kondisi yang dihadapinya, baik kondisi yang terdapat dalam organisasi maupun kondisi yang terdapat diluar organisasi tetapi mempunyai dampak bagi jalannya roda organisasi yang bersangkutan.

Paradigma yang seperti ini masih memerlukan tambahan "sesuatu" untuk menjadikan seseorang menjadi seorang pemimpin yang efektif. Artinya, modal berupa bakat memang penting, akan tetapi tidak cukup. Kesempatan memperoleh pengetahuan teoritikal melalui pendidikan dan pelatihan kepemimpinan juga sangat penting akan tetapi juga tidak cukup. Masih diperlukan adanya kesempatan untuk menduduki jabatan pimpinan yang memberikan kesempatan kepada yang bersangkutan untuk

Ada hal yang semakin menarik jika suatu masalah memiliki perbedaan-perbedaan baik dalam bentuk rupa, persepsi, warna masalah maka dengan prespektif ini yakni, perbedaan persepsi masyarakat tentang kepemimpinan politik wanita di daerah tentu sedikit banyak akan menemui tanggapan atau persepsi yang pro dan kontra di dalam lingkungan masyarakat. Apalagi di Kecamatan Wonosari merupakan daerah yang ramai atau perkotaan yang disitu banyak terdapat orang-orang yang memiliki tingkat pendidikan, latar belakang, agama yang tentunya lebih beragam dan akan menjadi hal yang sangat menarik jika menganalisa perbedaan pendapat dan persepsi masyarakat baik pria maupun wanita.

Menurut data dari kecamatan Wonosari terdapat 14 desa, dengan 78.488 warga penduduk dan luas wilayah keseluruhan kira-kira 7.799,73 Km². Dengan hal ini, tentu sangat mewakili beberapa pendapat dan persepsi masyarakat tentang kepemimpinan politik wanita di daerah khususnya pada pilkada Kab. Gunungkidul pada tahun 2005 dikarnakan sangat besarnya jumlah penduduk di Kecamatan Wonosari ini. . Tabel di bawah ini menunjukkan bahwa penduduk wanita lebih banyak dari pada penduduk pria di Kecamatan Wonosari.

Tabel 1.2.
Daftar Desa dan Jumlah Penduduk Tahun 2007
Kecamatan Wonosari

NO.	Nama Desa	Pria	Wanita	Jumlah total
1.	Wonosari	4159	4119	8278
2.	Kepek	5134	5168	10302
3.	Baleharjo	3161	3283	6444
4.	Siraman	2557	2474	4931
5.	Pulutan	1934	1996	3930
6.	Karang rejek	3284	2435	5719
7.	Duwet	1184	1266	2450
8.	Mulo	1928	2052	3980
9.	Karang tengah	3597	3627	7224
10.	Gari	2982	3047	6092
11.	Piyaman	3781	4020	7801
12.	Wunung	1455	1666	3121
13.	Selang	1898	2224	4122
14.	Wareng	2038	2046	4084
		38.992	39.423	78.488

Sumber: Data kependudukan Kec.Wonosari

Berdasarkan geografis masyarakat kecamatan Wonosari merupakan salah satu wilayah perkotaan padat penduduk yang notabene adalah masyarakat yang heterogen dengan berbagai profesi mulai dari petani, pengusaha dan pedagang yang memiliki taraf hidup dan pendidikan yang berbeda-beda, dengan hal ini maka justru akan banyak menuai pendapat dan persepsi masyarakat tentang kepemimpinan politik wanita di daerah..

Berdasarkan data jumlah sarana paenddikan yang ada di Kabupaten gunung kidul mencapai sebagai berikut:

1. TK : 562 buah
2. SD Negeri : 561 buah

3. SD Swasta : 52 buah
4. SLTP Negeri : 52 buah
5. SLTP Swasta : 49 buah
6. SMU Negeri : 12 buah
7. SMU Swasta : 14 buah
8. SMK : 26 buah
9. Perguruan Tinggi : 1 buah

Sedangkan untuk jumlah anak didik di Kecamatan Wonosari mencapai sebagai berikut:

1. TK : 1085 siswa
2. SD Negeri : 8360 siswa
3. SD Swasta : 538 siswa
4. SLTP Negeri : 1244 siswa
5. SLTP Swasta : 428 siswa
6. SMU Negeri : 1078 siswa
7. SMU Swasta : 876 siswa
8. SMK : 602 siswa
9. Perguruan Tinggi : 20 mahasiswa

Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan masyarakat di Kecamatan Wonosari sebagian besar telah mengenyam pendidikan dengan baik semua juga didukung oleh sarana dan prasarana yang baik dan memadai.

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah merupakan Undang undang penyempurnaan dari undang undang terdahulu

penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Relevansi merupakan aspek pendorong dalam terciptanya undang-undang baru tentang penyelenggaraan daerah.

Dalam undang-undang nomor 32 tahun 2004 pasal 24 menerangkan dengan jelas bahwa, setiap daerah dipimpin oleh kepala pemerintahan daerah disebut kepala daerah (pasal 1). Kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk provinsi disebut Gubernur, untuk kabupaten disebut Bupati, dan untuk kota disebut Walikota (pasal 2). Kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh satu orang wakil kepala daerah (pasal 3). Wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk provinsi disebut wakil gubernur, untuk kabupaten disebut wakil bupati, dan untuk kota disebut wakil bupati (4). Kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat di daerah yang bersangkutan¹. Dari penjelasan pasal-pasal diatas setiap kepala daerah dan wakil baik provinsi, kab/kota harus berjumlah satu pasangan, dimana tidak ada secara rinci menyebutkan hanya laki-laki saja atau sebaliknya, yang dapat menjadi birokrat-birokrat di daerah.

Di Indonesia gerakan emansipasi sebagaimana umumnya diketahui diilhami oleh tokoh pergerakan kemerdekaan R.A Kartini. melalui bukunya yang berjudul *Habis Gelap Terbitlah Terang*, tokoh ini menuangkan pikiran-pikirannya dalam bentuk surat menyurat dan risalah. Pemikirannya tidak menunjuk detail-detail masalah yang harus digugat oleh wanita. Tetapi secara umum beliau menghendaki peningkatan harkat dan martabat wanita jadi, sebenarnya tokoh Kartini tidak menghendaki sebagaimana

emansipasi di Barat. Namun hak-hak wanita yang memang menjadi haknya². Setelah Indonesia merdeka, utamanya pada masa orde baru peran wanita dalam pembangunan selalu mendapat porsi dalam GBHN pada setiap pelita. Sesuai dalam Tap Nomor II /MPR/1988.

Di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia telah menetapkan aturan legal bahwa kuota 30% Wanita dalam legislatif telah memberikan angin segar kepada calon-calon politik muda untuk semakin bersemangat memperjuangkan hak-haknya khususnya didunia politik. Hal ini juga dikuatkan dengan aturan Islam yang memperbolehkan diangkatnya seorang wanita sebagai pejabat dalam pemerintahan. Juga diperbolehkan bagi wanita menangani pengadilan memilih hakim, menunjuk seorang untuk suatu tugas pemerintahan, mengemukakan pendapat yang bersifat politik, ekonomi perundang-undangan, dan lain-lain sebagaimana boleh baginya mewakili dirinya kepada orang lain yang menghendakinya untuk mengajukan gagasannya serupa, serta boleh baginya untuk melakukan sebagai hubungan yang mendatangkan kemaslahatan bersama³.

Gambaran tentang peran dan posisi wanita di atas cukup jelas bahwa Islam memandang sama antara wanita dan pria dilihat dari segi kemanusiaan. Wanita adalah manusia dan priapun manusia, masing-masing tidak berbeda dari segi kemanusiaannya, bahkan tidak ada keistimewaannya bagi yang satu atas yang lainnya dari sudut ini atas ; atas dasar inilah pandangan islam terhadap pria dan wanita adalah sama. Sabda Nabi "sesungguhnya kaum wanita adalah setara dengan kaum pria".

C. Rumusan Masalah.

Berdasarkan materi yang telah dipaparkan oleh penulis dalam latar belakang masalah maka permasalahan yang akan penulis jawab dalam penelitian ini adalah:

“Bagaimana Persepsi Masyarakat Antara Pria dan Wanita Tentang Kepemimpinan Politik Wanita di Daerah Tahun 2008 di Kecamatan Wonosari, Kab.Gunung kidul?”

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

D.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada perumusan masalah di atas, maka tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah :

1. Hasil dari penelitian ini dapat digunakan masyarakat sebagai tolak ukur atau dapat mengetahui seberapa besar perbedaan persepsi dan pendapat masyarakat tentang kepemimpinan politik wanita di daerah.
2. Terkait dengan adanya tidaknya perbedaan persepsi masyarakat tentang kepemimpinan politik wanita di daerah diharapkan perjuangan wanita-wanita selanjutnya semakin lebih baik dan sebagai masyarakat harus mendukung dan percaya dengan memberikan kesempatan terhadap wanita untuk semakin eksis di dunia politik dan semua tergantung pada kesadaran dan daya fikir masyarakat dalam menubani peran wanita sentuhnya

3. Serta dapat digunakan sebagai syarat dalam menempuh tugas akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Politik.

D.2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan pada perumusan masalah diatas, maka manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Untuk dapat mengetahui ada tidaknya perbedaan persepsi antara pria dan wanita tentang kepemimpinan politik wanita di daerah di Kecamatan Wonosari.
2. Dapat diketahui seberapa besar kesadaran dan daya fikir masyarakat dalam menyikapi peran wanita di kepemimpinan politik di daerah seutuhnya.

E. Kegunaan Penelitian

E.1. Aspek teoritik.

Dalam prespektif Gender dan ajaran Islam menyikapi masalah peran wanita di tengah-tengah masyarakat sudah setara dengan kaum pria, senada dengan suatu peraturan pemerintah di DPR-RI bahwa porsi wanita mendapat 30% kursi di Legislatif. Dan bila ditinjau dari sisi eksekutif partisipasi wanita dalam politik lokal sangat terbatas dan selama ini wanita yang ikut serta dalam

F. KERANGKA DASAR TEORI

1. Persepsi

Dikemukakan para ahli, *Bima Walgito* : Persepsi merupakan proses pengorganisasian terhadap stimulasi yang di terima oleh organisme atau individu sehingga merupakan suatu yang berarti dan merupakan aktivitas yang integral dalam diri manusia.⁵

Dikatakan bahwa persepsi itu merupakan aktivitas yang integral, hal ini mengandung arti bahwa seluruh pribadi, seluruh apa yang ada dalam diri individu ikut berperan dalam persepsi.

Kemudian *Saparinah Sadli* memberikan persepsi sebagai berikut : Persepsi seseorang merupakan suatu proses yang aktif dimana, yang memegang peranan bukan hanya stimulus yang mengenalinya, tetapi ia juga sebagai keseluruhan dengan pengalaman-pengalamannya, motivasinya dengan sikap-sikap yang relevan terhadap stimulus tersebut.⁶

Lebih lanjut, *Miftah Thoha* memberikan batasan persepsi sebagai berikut : Persepsi yang bentuknya dalam proses kognitif yang dialami setiap orang dalam memahami informasi tentang lingkungannya, baik melalui penglihatan, pendengaran, penghayatan, perasaan dan penciuman. Kunci untuk memahami persepsi terletak pada pengenalan bahwa persepsi itu merupakan suatu

⁵ Bimo Walgito, 1991. *Psikologi Sosial sebagai Pengantar*. Yogyakarta: Andi offset, h.54.

penafsiran yang unik terhadap situasi dan bukannya suatu pencacatan yang benar terhadap situasinya⁷.

Dari berbagai pendapat yang telah dikemukakan dapat disimpulkan bahwa persepsi adalah : Suatu upaya atau proses alami berfikirnya individu dalam memahami objek dan informasi tertentu dengan menggunakan sarana, baik melalui penglihatan, pendengaran, penghayatan, dan penciuman. Dengan ini suatu persepsi dalam setiap individu akan mengalami perbedaan pendapat dikarenakan antara individu satu dan individu lain pasti terdapat ketidaksamaan arti. Hal ini merupakan bentuk pola fikir individu dalam memahami fenomena atau obyek tertentu yang sangat subyektif.

Bentuk persepsi suatu individu akan menentukan bagaimana seorang individu bersikap terkait dengan obyek tertentu yang tidak terlepas dari hubungannya bersama kondisi lingkungan sekitar dimana seorang individu bertempat tinggal. Artinya seorang individu dipengaruhi oleh lingkungannya disaat berada di suatu lingkungan yang mempunyai sistem nilai yang fanatik.

Sangat jelas bahwa agar terjadi persepsi harus ada hal-hal yang mencakup dalam proses persepsi itu sendiri.

Syarat-syarat yang tertu sangat diperlukan adalah :

- a. Alat panca indera yang baik,
- b. Obyek atau sasaran yang harus diamati, dan

c. Perhatian, dalam hal ini merupakan persiapan dalam mengadakan pengalaman.

Persepsi adalah suatu proses penataan dan penerjemahan kesan-kesan seseorang tentang keadaan lingkungan dimana ia tinggal. Dinyatakan dengan cara yang sederhana, persepsi merupakan cara pandang seseorang terhadap lingkungannya. Persepsi seseorang *per definisi* adalah suatu hal yang subjektif, dengan demikian suatu keadaan dapat diinterpretasikan sebagai "kenyataan" oleh seseorang berdasarkan persepsinya, meskipun kenyataan sebenarnya lain bentuk dan sifatnya

2. Wanita dan Politik

Pada dasarnya kita semua tahu bahwa antara kata Wanita dan Perempuan mempunyai arti dan makna yang sama, hal inipun diperkuat dengan berdasarkan kamus besar Bahasa Indonesia arti kedua kata itu adalah sinonim. Sehingga, mengapa akhir-akhir ini banyak kalangan cenderung menggunakan kata "Perempuan" daripada "Wanita" dalam hubungan sehari-hari ini dikarenakan pola fikir masyarakat yang semakin kritis dan cenderung memberi penekanan yang lebih dalam terhadap arti wanita yang sesungguhnya.

Dalam skripsi ini penulis lebih memilih kata "wanita" daripada "perempuan" karena, kata wanita itu memberikan makna yang resmi dan dapat menjadi panutan untuk orang banyak sedangkan, kata "perempuan" lebih

Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menjamin untuk melindungi hak asasi manusia dan kebebasan fundamental seluruh umat manusia, pria dan wanita, dengan *Universal Declaration of Human Rights* di tahun 1949. pengakuan hak-hak perempuan secara koppelensif juga telah dicapai, ketika PBB mengadopsi *Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (*Konvensi Wanita*) di tahun 1979. Indonesia telah meratifikasi Konvensi Wanita tersebut melalui UU No. 7 Tahun 1984⁸.

Konvensi wanita yang telah dicetuskan pada tahun 1979, tak pelak merupakan suatu prestasi bagi upaya penegakan hak wanita. Akan tetapi, dalam kenyataan terlihat bahwa Konvensi Wanita dalam pelaksanaannya tidaklah seindah kata-kata dalam piagam tersebut. Sesudah 20 (dua puluh) tahun, sejak pertama kali dicetuskan dan sesudah lebih dari 15 tahun Indonesia meratifikasi, terlihat bahwa kondisi umum wanita di Indonesia belum menggembirakan dan belum dapat memperbaiki serta mempengaruhi kehidupan kebanyakan wanita Indonesia keara yang lebih baik.

Perkembangan yang ada di Indonesia memperlihatkan , bahwa berdasarkan dan laporan komisi independent terlihat *tidak banyak kemajuan secara signifikan* yang dicapai oleh Indonesia dalam memperbaiki kehidupan mayoritas penduduk yang terdiri dari perempuan ini. Diskriminasi masih saja

kerap terjadi, yang menghambat atau menisbikan sumbangan wanita bagi kemajuan masyarakat.⁹

Di Indonesia, UUD 1945 menjamin persamaan hak antara pria dan wanita yang dinyatakan pada pasal 27 UUD 1945. Indonesia, juga telah meratifikasi Konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap Wanita melalui UU No. 7 tahun 1984 dan Konvensi Hak-hak Politik Perempuan melalui UU No. 68 tahun 1956. Kenyataan yang ada memperlihatkan, bahwa jaminan persamaan hak yang seperti tertuang dalam konvensi konstitusi, tidak berlaku dalam kenyataan sehari-hari. Dapat dinyatakan bahwa hak-hak asasi perempuan tersebut tidak sepenuhnya tersedia dan kadang-kadang perjuangan untuk mendapatkan hak-hak tersebut harus melalui usaha yang tidak mudah.

Di bidang politik, Konvensi wanita mengaturnya dalam Pasal 7, yang antara lain memuat ketentuan sebagai berikut :

1. Jaminan persamaan hak untuk memilih dan dipilih;
2. Jaminan untuk berpartisipasi dalam perumusan kebijakan pemerintah dan implementasinya;
3. Memegang jabatan dalam pemerintahan dan melaksanakan segala fungsi pemerintahan di semua tingkat;
4. Berpartisipasi dalam organisasi-organisasi dan perkumpulan;
5. Berpartisipasi dalam perkumpulan non-pemerintahan yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat dan politik Negara.

⁹ Ibid, h. 292.

Sebelumnya, dengan UU No. 68 Tahun 1956 pemerintah Indonesia telah pula meratifikasi Konvensi PBB tentang Hak-hak Politik Perempuan. Bagian terpenting dari Undang-undang tersebut memuat aturan bahwa :

1. Wanita mempunyai hak untuk memberikan suaranya dalam semua pemilihan dengan syarat-syarat yang sama dengan pria tanpa diskriminasi,
2. Wanita akan dapat dipilih untuk pemilihan dalam semua badan-badan pilihan umum, yang didirikan oleh nasional dengan syarat-syarat yang sama dengan pria, tanpa suatu diskriminasi,
3. Wanita akan mempunyai hak untuk menjabat umum dan menjalankan semua tugas-tugas umum, yang ditetapkan oleh hukum nasional dengan syarat-syarat yang sama dengan pria tanpa suatu diskriminasi.¹⁰

Semua aturan ini memperlihatkan bahwa tidak ada suatu peraturanpun yang mendiskriminasikan perempuan untuk berpartisipasi di bidang politik maupun dalam kehidupan publik lainnya. Berdasarkan pendapat yang telah dikemukakan di atas mengandung arti bahwa wanita mempunyai kesempatan dan peluang yang sama seperti pria dalam melakukan suatu kegiatan apapun diluar rumah, dimana pada saat ini dapat dilihat bahwa partisipasi wanita dalam

Dari beberapa peraturan yang ada tidak satupun kebijakan pemerintah yang menyudutkan wanita dalam hal keikutsertaannya dalam pembangunan namun, ada sesuatu hal yang menjadi catatan bahwa pengaruh mitos dan stigma wanita yang mengharuskan wanita terbelenggu dan terkekang dalam menjalani hidup. Seperti mitos yang berkembang di masyarakat yakni, mitos *kanca wingking* dimana, wanita hanya mengekor suami dan selalu identik mengerjakan masalah rumah tangga saja. Namun untuk saat ini kita harus bisa membedakan istilah *kanca wingking* yang kaum wanita harus dituntut untuk bisa tampil mandiri, dinamis, kreatif, penuh inisiatif dan professional dalam mengambil perannya disektor publik. Meski demikian wanita bukan berarti harus meninggalkan "naluri" keibuan yang penuh sentuhan perhatian dan kasih sayang terhadap anak dan suami serta lembut, hormat, etis dan bermartabat tinggi.

Dan dapat diketahui bahwa Islam juga membedakan antara pria dan wanita dalam sebagian peluang (kesempatan) mempertimbangkan aspek tabiat dari masing-masing kesiapan badani, aspek biologis dan pergulatan dalam kehidupan. Perbedaan itu dapat disebutkan sebagai berikut:

Pertama, adalah perbedaan pria dan wanita dalam persaksian.

Dalam QS. Al-Baqarah:28 disebutkan bahwa persaksian seorang pria sebanding dengan persaksian dua orang wanita.

Kedua, adalah perbedaan pria dan wanita dalam warisan, dalam islam

Ketiga, adalah perbedaan kepemimpinan kaum pria diatas kaum wanita, QS.an-Nisa':34 menyebutkan dengan jelas bahwa kaum pria (para suami) diberi kepercayaan untuk memimpin dan mengarahkan kaum wanita (para isteri). Hal ini disebabkan bahwa Allah telah memberi kaum pria kelebihan-kelebihan tertentu dan kemampuan memberi nafkah keluarga. Namun, kepemimpinan kaum pria, khususnya dalam keluarga tidaklah mutlak, tetapi terikat oleh kemampuan bergaul secara baik, rasa kasih sayang dan rasa tanggung jawab terhadap kaum wanita.¹¹

Hampir 95% bahkan lebih Negara-negara di dunia menjamin dua hak demokratik warga Negara (wanita termasuk didalamnya) yang paling mendasar, yaitu hak memilih (*right to vote*) dan hak untuk mencalonkan diri dalam pemilihan umum (*right to stand for election*). Namun demikian, jumlah Negara yang secara kuantitatif meningkat tersebut tidak dibarengin secara kualitatif dengan terjaminnya dan terpenuhinya keterlibatan wanita secara signifikan dalam wilayah partisipasi mereka. Hal ini terbukti sebagaimana terjadi di Negara Indonesia, di mana partisipasi wanita dalam politik dikategorikan masih sangat minim. Bahkan dibandingkan Negara-negara ASEAN, Indonesia menduduki posisi yang terendah.¹²

Pada jajaran eksekutif, kuantitas wanita untuk memduduki jabatan struktural PNS eselon III hingga eselon I mulai meningkat. Inventarisasi data kepegawaian instansi

¹¹ Azizah al-Hibri,dkk, 2001. *Wanita Dalam Masyarakat Indonesia:Akses, Pemberdayaan dan kesempatan*. Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, h. 50-53

¹² Agus Nurisman,dkk, 2006. *Kebijakan Elitis Politik Indonesia*. Yogyakarta: FISIP UGM dan Dustaka

pemerintah (Tim Peneliti BKN, Jakarta 2000) mencatat, bahwa jumlah PNS yang diolah per 30 Mei 2000 menunjukkan pria 62,42% (2.451.273 orang) sementara wanita 37,58% (1.475.873 orang). Namun demikian ironisnya, dari 30 daerah Tingkat I di Indonesia tidak satupun pemimpinnya dijabat oleh wanita, sedangkan dari 336 Daerah Tingkat II hanya 6 Daerah yang kepala daerahnya wanita. Sehingga, sangat wajar jika keputusan-keputusan yang dibuat sangat maskulin dan kurang berprespektif gender.

Beberapa faktor yang masih sangat kuat mempengaruhi di antaranya adalah: struktur budaya yang masih sangat patriarkhis, kondisi sosial, politik yang belum mendukung sepenuhnya kapasitas yang dimiliki wanita untuk bisa tampil, bersaing dan maju. Menanggapi peran wanita dan politik, *Roekmini Soedjono* pengamat politik dan anggota Komnas HAM peran wanita Indonesia dalam bidang ekonomi dan lainnya lebih maju dibanding Negara lain. Tapi wanita Indonesia terjebak pada budaya politik yang tidak memungkinkannya berperan penuh dalam kehidupan politik. Dimana, kita tahu bahwa selain pemerintah harus adanya pihak lain yang mendukung keterlibatan wanita dalam politik salah satunya adalah partai politik yang dinilai sangat efektif dalam menciptakan politikus-politikus baik pria maupun wanita karena partai merupakan wadah atau sarana yang menciptakan orang-orang yang cakap berpolitik, namun untuk saat ini kuota 30% wanita dalam legislatif sedikit-banyak mengalami perbaikan dan banyak partai berusaha mewujudkan hal itu.

Berdasarkan penelitian Dian Eka Rahmawati tentang "Women In Politic Sector" dengan tema partai Islam dan pemberdayaan politik perempuan, dalam lingkup PPP dan PKS menunjukkan bahwa untuk 30% kuota wanita sedikit berbeda pandangan. Dalam

penilaian PPP pada dasarnya mendukung kebijakan itu namun, dilapangan tidak bisa memenuhi kuota sedangkan PKS menerima dan bisa memenuhi kuota. Berdasarkan data yang diolah dari KPUD Yogyakarta dan DPW PPP dan PKS dapat dilihat komposisi dua partai tersebut:

1. PPP mencalonkan 20 calon legislatif wanita yang terpilih hanya 5 orang wanita (25%).
2. PKS mmencalonkan 46 calon legislatif wanita berhasil memboyong 18 orang wanita sebagai calon legislatif (39,13%) berarti PKS justru telah melampaui target kuota wanita dalam legislatif. Keberhasilan PKS ini tidak terlepas dari banyak kader pria dan wanita yang mempunyai pengalaman berorganisasi.

Masalah di atas merupakan salah satu yang terkecil dari kenyataan yang sedikit banyak telah memberikan angin segar pada prestasi politik yang dicapai oleh wanita selama ini, walaupun masih adanya sesuatu yang kurang namun cukup membuat kita berbangga atas perjalanan wanita selama ini yang hampir mencapai titik dimana, segala bentuk perjuangan pasti akan mendapat ganjaran yang baik.

Dapat kita tahu bahwa penelitian Republika menunjukkan ada faktor lain yang menyebabkan sosok wanita kurang terwakili dalam posisi politik adalah, faktor kultural dan struktural, faktor kultural misalnya ada mitos bahwa politik adalah dunia pria serta adanya kurang percaya diri terhadap diri wanita dalam berkompetisi dengan pria dalam

mendiskriminasi wanita. Sebanyak 15 orang responden (14,5%) menyatakan bahwa aktifitas wanita dalam politik terkendala oleh kurangnya dukungan pemerintah.

Adapun kendala yang lain adalah, seringkali wanita masih terjebak dalam friksi antara kepentingan partai dengan kepentingan wanita. Hal ini diperkuat dengan data jajak pendapat *Kompas* tanggal 24 februari 2003 yang menyatakan bahwa selama ini peran politik dan kinerja wanita di lembaga Negara baik dalam posisi penting di eksekutif maupun legislatif dirasakan belum memuaskan masyarakat baik itu diposisi pejabat setingkat dirjen, menteri hingga kepala Negara.

Pengembangan jati diri wanita adalah pengembangan identitas diri yang positif dan merupakan feminitas yang tidak komplementer terhadap maskulinitas. Sesuatu kondisi perkembangan tidak selalu mudah bagi wanita karena ini, berarti bahwa sebagai wanita ia harus mampu mengembangkan identitas positifnya di tengah-tengah mitos dan stereotipe yang seringkali justru mengingkari, tidak mendukung, dan malahan merendahkan wanita. Sudah jelas kiranya bahwa nilai-nilai sosial seperti di atas tidak mendukung kepada posisi wanita untuk bisa berpartisipasi aktif dalam pembangunan.

Pengalaman-pengalaman wanita dalam pemilu 1999 membuat keraguan wanita dalam pemilu 2004 antara lain menyangkut masalah-masalah, seperti: (a) masalah sistem pemilu terbuka dengan memilih tanda gambar partai dan calon (b) masalah internal demokrasi partai (c) masalah persyaratan di masing-masing partai (d) kurangnya dukungan finansial, kurangnya wanita dalam struktur dalam partai (e) syarat-syarat menjadi calon legislatif parpol, di mana semua ini menjadi suatu kendala lain yang harus dihadapi wanita bila hendak terjun ke dunia politik. Masalah internal partai

yang masih belum demokrasi dan berwawasan kesetaraan gender tampak pada kebijakan-kebijakan partai, di mana ketua partai (yang jelas kebanyakan adalah kaum pria) membuat kebijakan melalui *fit and proper test* menghasilkan kesimpulan bahwa si A (pria) lebih baik daripada si B (wanita) oleh karena itu si B ditaruh pada urutan di bawah si A.

3. Teori Kepemimpinan

a. Pengertian Empiris

Kepemimpinan adalah kegiatan manusia dalam kehidupan masyarakat. Dalam sejarah kehidupan manusia sudah sangat banyak pengalaman kepemimpinan yang dapat dipelajarinya. Pengalaman itu perlu dianalisis untuk mendapatkan butir-butir yang berharga dan bermanfaat dalam usaha mewujudkan kepemimpinan yang efektif pada masa sekarang dan mendatang, pengetahuan seperti inilah yang dimaksud sebagai pengertian kepemimpinan yang bersifat empiris. Untuk memahami pengertian kepemimpinan secara empiris tersebut di mulai dari segi terminologi. Kepemimpinan secara etimologi (asal kata) menurut Kamus besar Bahasa Indonesia berasal dari kata pimpin mendapat awalan *me* menjadi memimpin yang berarti menuntun, membimbing atau menunjukkan jalan, perkataan kepemimpinan menunjukkan pada semua perihal dalam memimpin termasuk juga kegiatannya.

Pengertian dari segi terminologi atau secara etimologi tersebut diatas, belum mampu memberikan penjelasan secara tuntas mengenai makna perkataan kepemimpinan dalam kehidupan manusia sebagai usaha

mewujudkan kebersamaan (sosialitas). Pada bagian awal dari pengertian secara terminologi dapat diidentifikasi beberapa gejala sebagai berikut:

1. Dalam kepemimpinan selalu berhadapan dua belah pihak. Pihak yang pertama disebut pemimpin dan pihak lainnya adalah orang-orang yang dipimpin, jumlah pemimpin selalu lebih sedikit daripada jumlah orang yang dipimpinnya.
2. Kepemimpinan merupakan gejala sosial, yang berlangsung sebagai interaksi antarmanusia dalam kelompoknya baik berupa kelompok besar yang melibatkan jumlah orang yang banyak maupun kelompok kecil yang jumlah orang yang terlibat di dalamnya sedikit.
3. Kepemimpinan sebagai perihal memimpin berisi kegiatan menuntun, membimbing, memandu, menunjukkan jalan, mengepelai dan melatih agar orang-orang yang di pimpin dapat mengerjakannya sendiri.

Dari sisi lain secara empiris terlihat bahwa kepemimpinan merupakan proses, yang berisi rangkaian kegiatan yang saling pengaruh-mempengaruhi berkesinambungan dan terarah pada suatu tujuan. Rangkaian kegiatan itu berwujud kemampuan mempengaruhi dan mengarahkan perasaan dan pikiran orang lain, agar bersedia melakukan sesuatu yang diinginkan pemimpin dan

termasuk juga kemampuan memotivasi atau menggerakkan seseorang atau sejumlah orang agar berbuat sesuatu sebagaimana disebutkan diatas.

b. Permasalahan dalam kepemimpinan wanita

Kepemimpinan wanita dalam berbagai posisi pemerintahan maupun yang lain untuk saat ini mulai mendapat sorotan dan tempat di hati masyarakat serta didukung oleh adanya suatu kepercayaan yang tinggi tentang kemampuan dan kualitas individu wanita itu sendiri untuk bisa mandiri mengelola masyarakat dalam kaedah kepemimpinan yang hakiki, adapun begitu masih banyak masalah yang menyangkut kendala, kekurangan dan kelebihan wanita yang masih perlu mendapat koreksi dari banyak pihak tentang kelayakan wanita dalam konteks pemimpin dalam politik.

1. Kendala wanita dalam politik

Sebagai manusia biasa wanita mempunyai kelemahan, kendala wanita internal-pribadi antara lain: adalah tujuan hidup yang sering tidak jelas, kurang motivasi megolah kemampuan yang ada pada dirinya, tidak mau mengenal dirinya sendiri, tidak mau menerima umpan-balik, tidak mau mengambil resiko, takut situasi baru/tidak siap dengan perubahan, kurang percaya diri dan mudah putus asa. Selain itu kendala wanita berasal dari eksternal/lingkungan sekitar antara lain; adat, birokrasi dan agama juga budaya yang yang selalu menghargai secara berlebihan terhadap atasan serta mendambakan harapan

pengetahuan dimulai dari awal sampai manula yang perlu dikupas tuntas

antara lain:

- Keluarga pemula: lahir sampai manula
- Persiapan anak sejak dini
- Pendidikan anak remaja
- Menjadi orang tua yang efektif
- Pengetahuan jaminan hari tua
- Kepemimpinan/berorganisasi wanita
- Harmonisasi keluarga
- Pandai berkomunikasi
- Peningkatan ketrampilan
- Pemberian nilai tambah “daur ulang”
- Kewiraswastaan
- Peningkatan diri
- Manajemen rumah tangga
- Peningkatan pekerja rumah tangga
- Hak dan kewajiban wanita.

Indikator semua ini bertumpu pada pengetahuan kesehatan, kemudian terlanjuti pada pendidikan yang akan berakibat terhadap ekonomi sejahtera, kesemua ini berkaitan dengan masalah kependudukan. Kita menyadari jumlah penduduk yang bertambah, yang harus mengubah pembangunan menjadi berkelanjutan dari nilai hidup kuantitas menjadi nilai kehidupan yang berkualitas, dan pola pembangunan harus berubah menjadi pembangunan yang ramah lingkungan. Titik strategis dalam wacana adalah keluarga, kualitas

Begitupula dengan nasib para kaum wanita yang akan menjadi *silent majority* jika tidak dapat menyuarakan aspirasi dan kepentingannya, tidak mengaktualisasikan diri sebagai warga Negara dan tidak hanya terlibat dalam rumusan kebijakan publik saja, namun wanita Indonesia harus meningkatkan kapasitas diri untuk mengejar kemajuan di segala bidang.

Namun ada beberapa penelitian yang ada menjadi acuan yakni wanita pada dasarnya dapat sama seperti kaum pria pada umumnya bisa menjadi pemimpin yang baik, berdasarkan penelitian yang dilakukan Caliper suatu perusahaan Sumber Daya Manusia Internasional membuktikan bahwa gaya kepemimpinan wanita yang komprehensif serta memiliki nilai-nilai positif dianggap lebih pas dengan gaya kepemimpinan saat ini. Menurut Herbert, pendiri dan CEO Caliper menilai wanita sebagai; mempunyai kepiawaian membujuk, tidak termakan ego, pemain tim, memiliki charisma, berani mengambil resiko.¹³

2. Wanita sebagai pemimpin

Kepemimpinan yang baik adalah kunci keberhasilan, wanita sebagai penerus nilai dan norma dalam keluarga di suatu lingkungan masyarakat yang strategis mau berperan sebagai pelaku perubahan/*agent of change*.

Sosok wanita sebagai pelaku perubahan memerlukan: pengetahuan untuk mengantisipasi masalah, konsep yang mantap, tahu apa yang akan dicapai dan dapat mengukur kemampuan, berani mengambil tindakan, menanggung resiko. Selain itu,

Wanita wanita menjadi pemimpin yang visioner, kreatif dan menjadi mitra kaum

pria. Kemampuan yang harus dimiliki adalah motivasi, komunikasi, mau mengambil keputusan dan mereka harus mampu memberikan dorongan, bimbingan, bantuan, keteladanan serta kemudahandengan arahan agar orang lain mau mengubah cara fikir dan tingkah laku agar dapat mencapai tujuan. Sikap kepemimpinan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengembangan diri, karakter serta kepribadian. Namun faktor yang penting adalah integritas diri dan pandangan hidup.

Di era reformasi saat ini harus sebagai proses transisi menuju demokrasi bagi wanita, era ini sebenarnya memberi kesempatan mengaktualisasikan diri tidak ada lagi subordinasi dan marginalisasi wanita sebagai pengambil keputusan, dan masyarakat harus mengetahui bahwa di pundak wanita terletak kualitas generasi yang akan datang.

Ada beberapa hal yang sangat penting dimana, kepemimpinan politik wanita di daerah akan mendapat banyak tanggapan dan persepsi masyarakat terkait dengan apa yang wanita lakukan diluar kebiasaan dirumah yakni, berpolitik. Adapun kepemimpinan politik wanita dapat dilihat dari beberapa indikator antara lain:

a. Pendidikan

Di bidang pendidikan, kaum wanita masih tertinggal dibandingkan kaum pria, kondisi ini antara lain disebabkan adanya pandangan dalam masyarakat yang mengutamakan dan mendahulukan pria untuk mendapatkan pendidikan daripada wanita. Ketertinggalan wanita dalam bidang pendidikan tercermin dari persentasi wanita buta huruf lebih besar daripada pria pada tahun 2001

mengalami penurunan namun posisi wanita masih yang tertinggi sekitar 12,69% sedangkan pria 5,85%. Sedangkan pada tahun 2003 kembali mengalami penurunan angka buta huruf sebanyak 12,28% wanita 5,84% pria. Hal ini berdasarkan data BPS Statistik Kesejahteraan Rakyat tahun 2002-2003.

Tentu dengan permasalahan seperti ini pendidikan merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam peran wanita di dunia politik Dimana, dengan dilihat dari jenjang pendidikan maka akan terlihat kemampuan dan kredibilitas wanita itu sendiri.

b. Kemampuan

Berbagai teori tentang kepemimpinan yang efektif dan pengalaman banyak orang menunjukkan bahwa efektifitas kepemimpinan seseorang selain terletak pada kemampuan untuk melaksanakan kegiatan yang bersifat teknis operasional, juga pada kemampuan untuk berfikir. Cara dan kemampuan berfikir yang diperlukan adalah yang integralistik, strategik dan berorientasi pada pemecahan masalah. Serta telah diakui secara luas bahwa kemampuan mengambil keputusan merupakan salah satu kriteria utamanya. Bahkan kemampuan mengambil keputusan dewasa ini pada umumnya diterima sebagai inti kepemimpinan, memang penelitian dari banyak ilmuwan dan pengalaman dari banyak praktisi menunjukkan bahwa efektifitas kepemimpinan seseorang pada akhirnya dinilai dengan kemampuan mengambil keputusan sebagai kriteria utamanya

Dalam hubungan ini perlu ditekankan bahwa yang dimaksud dengan kemampuan mengambil keputusan tidak terutama diukur dengan ukuran kuantitatif, dalam arti jumlah keputusan yang diambil melainkan dalam jumlah keputusan yang diambil yang bersifat praktis,realistis dan dapat dilaksanakan serta memperlancar usaha pencapaian tujuan organisasi¹⁴. Dapat dipastikan bahwa tidak ada seorangpun pimpinan baik pria dan wanita termasuk pimpinan politik yang senang bila dinilai gagal menjalankan tugas-tugas kepemimpinannya. Berarti setiap pimpinan akan berusaha meningkatkan efektifitas kepemimpinannya. Salah satu bukti keberhasilan meningkatkan efektifitas kepemimpinan itu ialah semakin tingginya tingkat pengakuan dan penerimaan orang lain terhadap kepemimpinan orang yang bersangkutan.

c. Keteladanan

Seorang pimpinn harus mampu memproyeksikan kepribadiannya demikian yang tercermin dalam bentuk antara lain, kesetiaan kepada organisasi, kesetiaan pada bawahan, dedikasi kepada tugas, disiplin kerja, landasan moral dan etika yang digunakan, kejujuran, perhatian kepada kepentingan dan kebutuhan bawahan dan berbagai nilai-nilai hidup lainnya yang bersifat positif.

Efektifitas kepemimpinan seseorang akan lebih besar lagi apabila keteladanannya tidak hanya tercermin dalam kehidupan organisasional, akan

tetapi juga dalam kehidupan pribadinya, seperti kehidupan keluarga yang harmonis, gaya hidup yang sesuai dengan kemampuan dan memperhitungkan keadaan lingkungan serta peka terhadap kondisi sosial sekitarnya. Keteladanan sangat penting karena para bawahan sesungguhnya menggunakan kriteria yang sangat sederhana saja, tetapi mempunyai makna yang sangat mendalam, yakni: Keteladanan seseorang terlihat dari apa yang dilakukan oleh seseorang dan bukan apa yang dikatakannya. Keteladanan antara lain berarti melakukan apa yang harus dilakukan dan tidak melakukan hal-hal yang tidak boleh dilakukan, baik karena keterikatan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun karena limitasi yang ditentukan oleh nilai-nilai moral, etika dan sosial. Sangat fundamental untuk dinyatakan ialah adanya disiplin pribadi yang tinggi karena dari disiplin pribadi yang tinggi itulah "mengalir" beberapa manifestasi keteladanan tersebut¹⁵

Dengan keteladanan yang hakiki baik pemimpin wanita maupun pria diyakini akan terwujud suatu pemimpin yang baik dan disayangi masyarakatnya.

d. Kesempatan

Banyak orang-orang berpendapat bahwa "pemimpin dibentuk dan ditempa" (*leaders are made*). Pandangan ini berkisar pada pendapat yang mengatakan bahwa efektifitas kepemimpinan seseorang dapat dibentuk dan

seseorang bersangkutan untuk menumbuhkan dan mengembangkan efektifitas kepemimpinannya melalui berbagai kegiatan pendidikan dan latihan kepemimpinan. Dalam hal efektifitas kepemimpinan, paradigma yang lebih mendekati kebenaran ilmiah yang didukung oleh pengalaman para praktisi mengatakan bahwa efektifitas kepemimpinan seseorang dilandasi dengan modal bakat yang dibawa sejak lahir akan tetapi ditumbuhkan dan dikembangkan melalui dua jalur, yakni: *pertama*, adanya kesempatan untuk menduduki jabatan pimpinan *kedua*, dan tersedianya kesempatan yang luas untuk menempuh pendidikan dan latihan kepemimpinan¹⁶

Dapat diketahui bahwa dengan adanya kesempatan yang seluas-luasnya bagi wanita Indonesia dapat berkecimpung di dunia politik, maka akan meruntuhkan mitos-mitos yang berkembang di masyarakat yang selama ini justru membelenggu hak-hak wanita yang sebenarnya. Bersamaan dengan ini dukungan pemerintah dan partai politik selaku penentu jalan politik seseorang tentu akan menjadi prioritas utama dalam mewujudkan kesetaraan gender.

Kempat indikator diatas merupakan suatu batasan teknik yang harus dimiliki kepemimpinan politik wanita di daerah dan sangat mempengaruhi persepsi dan

... .. dan politik dengan kata lain jika wanita mampu

mempunyai seluruh aspek diatas didalam dirinya maka, jalan dan kesempatan menuju sukses di politik akan terbuka lebar.

G. HIPOTESIS

Hipotesa adalah sarana penelitian ilmiah yang penting dan tidak bisa ditinggalkan, karena ia merupakan instrument kerja dari teori. Sebagai hasil deduksi dari teori atau proposisi, hipotesa lebih spesifik sifatnya, sehingga lebih siap untuk diuji secara empiris¹⁷.

Hipotesis komparatif merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah komparatif. Pada rumusan ini variabelnya sama tetapi populasi atau sampelnya yang berbeda, atau keadaan itu terjadi pada waktu yang berbeda.

a. Rumusan masalah komparatif

Bagaimana persepsi masyarakat atas kepemimpinan politik wanita dibandingkan dengan pria

b. Hipotesis komparatif

Berdasarkan rumusan masalah komparatif tersebut dapat dikemukakan *model hipotesis nol dan hipotesis alternative sebagai berikut:*

Hipotesis Nol:

Ho : Tidak terdapat perbedaan persepsi masyarakat antara Wanita dan Pria tentang kepemimpinan politik wanita

Hipotesis Alternatif

Ha : Ada perbedaan persepsi masyarakat antara Wanita dan Pria tentang kepemimpinan politik wanita.¹⁸

Jika dikaitkan dalam masalah Analisis Persepsi Masyarakat Tentang Kepemimpinan politik Wanita di daerah tahun 2008 di Kabupaten Gunungkidul ini penulis memberikan suatu perbedaan yang mendasar dari apa yang dimaksudkan bahwa perbedaan antara pria dan wanita dalam partisipasi politik yakni, banyaknya masyarakat yang menilai bahwa kaum pria lebih kuat dan mampu dalam memimpin suatu wilayah sedangkan wanita dinilai kurang mampu karena masih adanya nuansa mitos yang di identikkan dengan urusan rumah tangga dan stigma-stigma bahwa wanita selalu dalam posisi domestik dianggap sebagai sesuatu hal yang mengakibatkan wanita terlambat memulai dalam berkiprah di dunia politik. Maka dapat kita lihat, saat ini bahwa mitos tersebut lambat laun telah berangsur-angsur pupus karena era modernitas dan perubahan cara berfikir, cara pandang masyarakat dalam menilai sosok wanita yang sebenarnya serta telah banyak wanita yang sukses diberbagai bidang baik politik ataupun yang lain secara tidak langsung telah membuktikan semuanya. Kita tidak boleh lagi menganggap wanita itu lemah tetapi, justru wanita itu kuat dan sekarang sudah waktunya unjuk kebolehan bersama pria.

Persepsi masyarakat mempunyai andil yang sangat besar dalam kelangsungan proses politik di daerah yakni pilkada, apalagi kita dapat melihat bahwa semakin lama wanita akan semakin pintar dan wajib diperhitungkan

¹⁸ -

kapasitasnya diluar rumah seperti akhir-akhir ini wanita telah banyak menduduki posisi strategis di eksekutif maupun legislatif baik di pemerintah pusat maupun daerah. Hal ini menandakan bahwa peran wanita di posisi sama yang dengan pria berani dipertanggung-jawabkan secara terang-terangan. Pada saat ini pun telah banyak wanita mencalonkan diri ataupun menjadi partner kerja sebagai wakil kepala daerah di ajang bursa pencalonan kepala daerah maupun yang lain mengalami peningkatan dari tahun-tahun terdahulu. Pilkada merupakan suatu kegiatan politik di tingkat daerah yang secara rutin dapat dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku di Negara Indonesia membawa dampak positif bagi kelangsungan nasib putra daerah baik pria maupun wanita yang sama-sama mempunyai hak untuk memilih ataupun dipilih.

H. DEFINISI KONSEPSIONAL

Sejalan dengan hal tersebut, maka konsep tentang Analisis Persepsi masyarakat Tentang Kepemimpinan Politik Wanita di Daerah tahun 2008, mempunyai batasan pengertian sebagai berikut :

1. Persepsi adalah bentuk pola fikir seseorang dalam memahami sesuatu fenomena atau obyek tertentu yang sangat subyektif. Dan merupakan suatu proses yang aktif dimana memegang peranan bukan hanya stimulus yang mengenalinya, tetapi itu sebagai keseluruhan dengan pengalaman-

2. Kepemimpinan Politik Wanita dalam kaca mata prespektif Gender merupakan suatu persamaan hak terhadap kaum pria, dimana wanita dapat mempunyai akses lebih diluar rumah dan dapat berguna bagi lingkungan masyarakatnya. Dengan hal ini, kita berharap tidak akan ada diskriminasi wanita. Wanita mempunyai hak untuk memilih dan dipilih dalam arti hak-hak politik maka dengan ini dengan adanya partisipasi wanita dalam politik lokal di Indonesia merupakan upaya wanita dalam menghapus persepsi bahwa wanita hanya memiliki akses didalam rumah saja.

H. DEFINISI OPERASIONAL

Menurut *Koentjaraningrat*, yang dimaksud dengan definisi operasional adalah usaha mengubah konsep-konsep yang berupa construct dengan kata-kata yang menggambarkan perilaku-perilaku atau gejala yang dapat diuji dan ditentukan kebenarannya oleh orang lain.¹⁹

Menurut *Masri Singarimbun*, definisi operasional adalah unsur penelitian yang memberitahukan bagaimana caranya mengukur suatu variabel. Dengan kata lain, semacam petunjuk pelaksanaan bagaimana caranya mengukur suatu variabel.²⁰

Dalam penelitian ini penulis akan meneliti dan mengamati serta menggambarkan secara jelas “Bagaimana persepsi masyarakat tentang peran wanita dalam politik lokal pada pilkada” dengan melihatnya dari sudut:

1. Persepsi

Dalam masalah kepemimpinan politik wanita di daerah di kecamatan Wonosari yang menjadi garis besarnya adalah sikap dan persepsi masyarakat tentang kepemimpinan wanita didaerah ada yang pro dan kontra, sehingga perlu penganalisaan yang lebih akurat untuk membedakan ada tidaknya perbedaan persepsi antara masyarakat pria dan wanita.

2. Kepemimpinan Politik Wanita

Merupakan suatu subyek atau pelaku politik yang masih banyak menemui hambatan dan kendala yang tidak sedikit dalam mewujudkan bentuk partisipasinya dalam masyarakat, dan masih adanya stigma-stigma yang mengidentikkan wanita sebagai figur domestik ketimbang berkarier diluar rumah atau aktif di dunia politik.

Keefektifan kepemimpinan politik wanita dapat dilihat dari:

a. Pendidikan

Adalah suatu pembelajaran yang bersifat formal dapat ditempuh mulai dari TK sampai Perguruan tinggi. Dan peran pendidikan sebagai sarana untuk mengaktualisasikan diri serta sebagai alat mengembangkan kompetensi-kompetensi profesional. Dan dapat diketahui bahwa taraf pendidikan antara wanita dan pria sangat berbeda jauh sehingga, dapat dipastikan bahwa wanita masih mengalami ketimpangan dalam hal

b. Kemampuan

Adalah dapat melakukan dan menyelesaikan suatu masalah dengan baik dan dapat membaca situasi yang dihadapi secara tepat serta dapat memahami implikasinya.

c. Keteladanan

Merupakan perilaku yang ditujukan kepada kesetiaan kepada organisasi, kesetiaan pada bawahan, dedikasi kepada tugas, disiplin kerja, landasan moral dan etika yang digunakan, kejujuran, perhatian kepada kepentingan dan kebutuhan bawahan dan berbagai nilai-nilai hidup lainnya yang bersifat positif.

d. Kesempatan

Caranya yang baik untuk memberdayakan wanita dalam politik adalah dengan cara memberikan kesempatan yang luas kepada seseorang bersangkutan untuk menumbuhkan dan mengembangkan efektifitas kepemimpinannya melalui berbagai kegiatan pendidikan dan latihan kepemimpinan.

Indikator di atas merupakan syarat teknis yang harus dimiliki dan ada pada diri wanita dalam konteks kepemimpinan politik wanita, hal ini tentu akan menyamai kemampuan pria yang pada umumnya telah mendominasi didalam bidang politik dan lainnya. Dengan kemampuan kualitas wanita yang seperti ini maka nasib wanita

G. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian survey. Penelitian survey adalah pengumpulan informasi secara sistematis dari para responden dengan maksud untuk memahami dan meramal beberapa aspek perilaku dari populasi yang diamati. Penelitian survey harus memperhatikan (*concerned*) pada sampling, desain kuisisioner atau interview, pengadministrasian kuisisioner dan analisis data.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian berada di Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul Yogyakarta. Persoalan yang mendasar di Kabupaten Gunungkidul ini adalah salah satu dari kepala daerahnya merupakan wanita yakni wakil dari Bupati Gunungkidul, sehingga lokasi ini sedikit-banyak akan memberikan wacana bagi penulis untuk menganalisis persepsi masyarakat terhadap kepemimpinan politik wanita di daerah tahun 2005.

3. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel

Subyek penelitian tersebut bisa juga disebut populasi. Populasi adalah keseluruhan dari unit analisis yang ciri-cirinya akan diduga.

Menurut Sutrisno Hadi, populasi adalah keseluruhan penduduk yang dimaksudkan untuk diselidiki sedangkan sampel adalah sebagian dari populasi yang akan diselidiki. Untuk menentukan besarnya sampel yang akan diambil

agar mendapatkan data yang representatif, menurut Ida Bagus Mantra dan Kastro ada empat faktor yang harus diperhatikan:

1. Derajat keseragaman (degrees of homogeneity) dari populasi, semakin seragam populasi, maka semakin kecil sampel yang akan diambil;
2. Presisi yang kehendaki dari penelitian. Semakin tinggi tingkat presisi yang dikehendaki maka akan semakin besar sampel yang akan diambil. Jadi sampel besar cenderung memberikan pandangan yang lebih mendekati nilai sesungguhnya (true value);
3. Rencana analisis;
4. Tenaga, biaya dan waktu.

Dari uraian diatas bila kita kaitkan dengan skripsi ini, maka populasi yang akan diambil untuk mencapai nilai sesungguhnya adalah keseluruhan jumlah penduduk yang ada di kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul yang berjumlah 78.488 orang yang tersebar kebeberapa wilayah , sedangkan sampelnya adalah sebagian kecil dari populasi yang ada. Selanjutnya demi menjamin pemerataan populasi maka penyusun mengambil sampel yang dilakukan secara *cluster sampling*, yang mana dari keseluruhan 18 kecamatan di Kabupaten Gunung kidul akan dipilih 1 kecamatan sampel. Dari 1 kecamatan sampel tersebut kemudian akan diacak kembali dengan ketentuan berdasarkan letak geografis yang ada pada tiap-tiap desa tersebut. Selanjutnya mengingat jumlah sampel yang harus diambil adalah 200 orang masyarakat, maka

Tabel 1.3
Dari 1 Kecamatan ditentukan 5 desa terpilih

No	Desa	Responden	Jatah Pria dan Wanita
1	Wonosari	40	18 dan 22
2	Baleharjo	40	20 dan 20
3	Kepek	40	17 dan 23
4	Karangtengah	40	14 dan 26
5	Gari	40	14 dan 26

Sumber: Data primer yang diolah

Dalam menentukan sampel penulis menggunakan teknik *cluster sampling* disebabkan karena daerah pupulasi yang luas sehingga penulis menganggap bahwa sistem ini sangat mewakili keterwakilan tanggapan masyarakat.

Pengambilan sampel sistematis ialah suatu metode pengambilan sampel, di mana hanya unsur pertama saja dari sampel dipilih secara acak, sedangkan unsur-unsur selanjutnya dipilih secara sistematis menurut suatu pola tertentu. Metode ini dapat dijalankan pada dua keadaan yaitu:

1. Apabila nama atau identifikasi dari satuan-satuan elementer dalam populasi itu terdapat dalam suatu daftar (kerangka sampling),

2. Apabila populasi itu mempunyai pola beraturan, seperti blok-blok dalam kota, atau rumah-rumah pada suatu jalan. Blok-blok atau rumah-rumah itu dapat diberi nomor urut²¹.

Maka dengan ini rumus pengambilan sampel yang akan diambil menggunakan rumus sebagai berikut:

$$k = \frac{N}{n}$$

$$k = \frac{38277}{200}$$

$$= 191$$

Keterangan: k: Hasil bagi (interval sampel)

N: Ukuran populasi

n: Ukuran sampel

Sampling sistematis merupakan teknik pengambilan sampel berdasarkan urutan dari anggota populasi yang telah diberi nomor urut. Berkaitan dengan penelitian ini maka dapat dijabarkan bahwa hasil bagi dari seluruh populasi adalah 191, tentu angka ini akan menjadi patokan perhitungan sampel yang akan diambil sebanyak 200 sampel. Dapat diketahui bahwa anggota populasi 5 desa di Kecamatan Wonosari seluruhnya mencapai 38.277 warga dari semua anggota di berikan nomor urut 1 sampai dengan

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menggunakan beberapa cara, agar data yang diperoleh merupakan data yang sah atau valid, yang merupakan gambaran sebenarnya dari kondisi yang ada dalam Analisis persepsi masyarakat tentang peran wanita dalam politik lokal pada pilkada. Teknik yang digunakan meliputi: Questioner, wawancara, observasi, dan dokumentasi.

a. Questioner

Suatu metode pengumpulan data dari responden yang dilakukan melalui pengisian daftar pertanyaan yang diberikan kepada seseorang dengan maksud untuk mendapatkan informasi yang relevan. Daftar pertanyaan yang diberikan dan digunakan adalah pertanyaan yang bersifat tertutup yakni kemungkinan jawabannya sudah ditentukan lebih dahulu dan responden tidak diberikan suatu peluangpun untuk menjawab yang lain.

b. Wawancara/Interview

Yakni teknik pengumpulan data dengan mengadakan wawancara, berkomunikasi langsung dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan tertentu kepada responden atau warga wilayah Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul.

Pengertian wawancara dapat disamakan dengan suatu tindakan

“Interview dapat dipandang sebagai metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab sepihak dikerjakan dengan sistematika dan berdasarkan tujuan penelitian”.

Sedangkan dari pendapat Koentjaraningrat memberikan definisi wawancara sebagai berikut:

“Sebagai proses tanya jawab lisan dalam dua orang atau lebih berhadapan secara fisik. Metode interview atau wawancara mencakup yang mempergunakan kalau seseorang untuk tujuan tertentu mencoba mendapatkan keterangan atau pendirian secara lisan dari seseorang responden dengan bercakap-cakap berhadapan muka dengan orang lain.²²

c. Observasi

Merupakan kegiatan pengumpulan data dengan melakukan suatu pengamatan secara langsung di lokasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

Menurut Sutrisno Hadi, teknik observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki. Tetapi perlu diperhatikan bahwa pencatatan dan pengamatan itu tidak hanya terbatas pada pengamatan langsung sebab tugas seorang pengamat bukan hanya sekedar menonton dari apa yang terjadi melainkan sebanyak mungkin mengumpulkan keterangan atas dasar yang dilihat.²³

²² Koentjaraningrat, 1997. *Metode-metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: PT Gramedia, h. 162.

d. Dokumentasi

Yakni teknik pengumpulan data yang berasal dari dokumen-dokumen, buku catatan-catatan dan literatur lainnya yang ada kaitannya dengan kegiatan penelitian ini.

Melalui teknik dokumentasi akan diamati fenomena dari obyek yang diteliti dari berbagai dokumen yang ada. Sartono memberikan pendapatnya bahwa dokumen sebagai bahan klasik untuk meneliti perkembangan historis yang khusus, biasanya digunakan untuk menjawab persoalan tentang apa, kapan, dan dimana. Jawaban disusun secara konfigurasi yang khas dan memuat fakta yang menyatakan secara deskriptif.²⁴

5. Teknik Analisis Data

Dalam analisis data, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif dan kuantitatif. Dalam penelitian kualitatif yakni data-data yang telah terkumpul akan diinterpretasikan sesuai arti yang akan disesuaikan dengan tujuan dan kepentingan penelitian.

Menurut Winarno Surachman sifat dan bentuk penelitian kualitatif ini adalah menuturkan dan menafsirkan data yang ada, misalnya tentang situasi yang dialami, suatu hubungan, kegiatan, pandangan sikap yang menampak atau tentang proses yang sedang berlangsung, kelainan yang sedang muncul,

kecenderungan yang sedang nampak, pertentangan yang sedang meruncing dan sebagainya.²⁵

Demikian juga dalam penelitian ini untuk menganalisa permasalahan mengenai persepsi masyarakat tentang peran wanita dalam politik lokal pada pilkada akan digunakan juga suatu analisis kualitatif. Karena data-data yang telah terkumpul akan dideskripsikan dalam bentuk tabel agar mudah dibaca dan dipahami. Dan kemudian dari pemaparan tersebut dicoba untuk dianalisis dan diinterpretasikan sehingga memperoleh daya dan kesimpulan yang akurat.

Adapun analisis data yang lain menggunakan metode analisis kuantitatif yang dimaksudkan untuk memperoleh gambaran khusus yang bersifat menyeluruh tentang apa yang tercakup dalam permasalahan yang diteliti yang dilakuka dilapangan pada waktu mengumpulkan data.

Dalam proses analisis menurut pendapat Miles dan Huberman ada 3 komponen pokok yang merupakan model yang saling terjalin atau model interaktif yakni:

1. Reduksi data, merupakan proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan, dan abstraksi data kasar yang dilakukan selama berlangsungnya proses penelitian.

Sajian data, merupakan rangkaian informasi untuk mempermudah pemahaman yang disusun secara sistematis yang dapat berupa

$$I = \frac{4+1}{4}$$

$$I = \frac{3}{4}$$

$$I = 0,75$$

Keterangan untuk kategori:

- 1,00 – 1,75 : Kategori Tidak Baik
- 1,76 – 2,50 : Kategori Kurang Baik
- 2,51 – 3,25 : Kategori Baik
- 3,26 – 4,00 : Kategori Sangat Baik

gambar, skema dan table sehingga penarikan kesimpulan dapat dilakukan.

2. Penarikan kesimpulan, merupakan penarikan kesimpulan akhir yang dilakukan setelah pengumpulan data terakhir.²⁶

Sedangkan untuk mengetahui tingkat persepsi masyarakat akan digunakan Indeks dengan rumus sebagai berikut:

Rumus indeks:

$$\frac{(f_a \times 4) + (f_b \times 3) + (f_c \times 2) + (f_d \times 1)}{N}$$

Keterangan :

N = Jumlah Populasi

f_a = frekuensi yang menjawab option a

f_b = frekuensi yang menjawab option b

f_c = frekuensi yang menjawab option c

f_d = frekuensi yang menjawab option d

Indeks tersebut adalah sebagai berikut

1	2	3	4

Untuk mendapatkan kategori digunakan rumus interval indeks

$$I = \frac{\text{Skor Tertinggi} - \text{Skor Terendah}}{\text{Jumlah Skor}}$$